



**HAK DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERSTATUS WARGA
NEGARA ASING (WNA) DALAM PEWARISAN PROPERTI MENURUT
KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum**

Oleh

FARA SHABIRA ALMEGA

NIM 11000118130429

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**HAK DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERSTATUS WARGA
NEGARA ASING (WNA) DALAM PEWARISAN PROPERTI MENURUT
KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

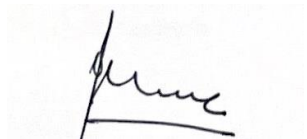
Oleh :

FARA SHABIRA ALMEGA

NIM. 11000118130429

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Yunanto, S.H., M. Hum.

NIP. 196105301987031001

Pembimbing II



HERNI WIDANARTI, S.H., M.Hum.

NIP. 19630708198903200

HALAMAN PENGUJIAN

**HAK DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERSTATUS WARGA
NEGARA ASING (WNA) DALAM PEWARISAN PROPERTI MENURUT
KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

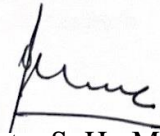
FARA SHABIRA ALMEGA

NIM. 11000118130429

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Yunanto, S. H., M. Hum

NIP. 196105301987031001

Anggota Penguji I



Dr. Aminah, S. H., M. Hum

NIP. 196412041990032002

Anggota Penguji II



HERNI WIDANARTI, S. H., M. Hum

NIP. 19630708198903200

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Sulistyawan, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fara Shabira Almega

NIM : 11000118130429

Jurusan : Hukum Perdata Barat

Fakultas : Hukum

Judul : HAK DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERSTATUS
WARGA NEGARA ASING (WNA) DALAM PEWARISAN
PROPERTI MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI MASA PANDEMI COVID-19

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,



Fara Shabira Almega

11000118130429

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“She believed she could, so she did.” – R.S. Grey.

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

Allah SWT,

Orang tua dan keluarga terkasih,

Sahabat yang selalu ada untuk Penulis,

Dosen pembimbing yang terhormat,

Almamater dan Bangsa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“HAK DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERSTATUS WARGA NEGARA ASING (WNA) DALAM PEWARISAN PROPERTI MENURUT KUPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19”** ini dengan baik. Penulisan hukum ini disusun sebagai tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik karena berkat doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk kritik, saran maupun motivasi yang telah diberikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M. H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, semangat, dorongan, dan motivasi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;

5. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, semangat, dorongan, dan motivasi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Bapak Suhartoyo, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan bimbingan sejak awal masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama perkuliahan;
8. Bapak Muhammad Barly Ramadhany dan Ibu Nina Widaningsih selaku Orang Tua penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu berkorban dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis, serta Kakak dan Adik tersayang Muhammad Nauval Khairy dan Muhammad Raihan Aliy yang senantiasa menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan masa studi;
9. Sahabat tercinta di Semarang yang selalu memberikan saran dan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini; Ahmad Aqib Nurrachman, Nouval Eka Tidar Bramantya, Fahmi Ilham Auliya, Rafaela Tesalonika Netanya, Annisa Hanifati, Helen Serevina Simbolon, Kezia Andita, Anggi dan masih banyak lainnya.
10. Sahabat tercinta di Palembang yang juga memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis; Elsa Putri Damayanti, Ayu Maharani Lindy, Nurul Aqilah Hakiki, Azellia Zahri, Dekti Ahdina, Masayu Fifi, Regina Harum Kenangah,

Pasa Adelia Kautsar, Zahratu Fania, Mahiro Muzdalifah, Alda Aprilia, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

11. Teman-teman DIMAS BEM FH UNDIP 2019, BPH BEM FH UNDIP 2020, dan BPH BEM 2021 yang telah memberikan cerita selama masa perkuliahan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2018 yang telah berbagi ilmu untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
13. Almamaterku tercinta Universitas Diponegoro.

ABSTRAK

Persoalan mengenai ahli waris negara asing yang berasal dari perkawinan campuran kerap kali menimbulkan pertanyaan mengenai hak dan kewenangannya untuk menerima harta warisan. Terlebih lagi selama masa pandemi Covid-19 terdapat pembatasan masuknya WNA demi menekan angka penyebaran virus di Indonesia, padahal ahli waris WNA bisa saja tidak berdomisili di Indonesia. Sedangkan dalam pengurusan peralihan hak atas tanah karena pewarisan diperlukan kehadiran fisik. Kemudian apabila ahli waris WNA melampaui jangka waktu satu tahun yang ditentukan UUPA, maka akan terancam warisan tersebut akan jatuh kepada negara. Hal tersebut akan merugikan ahli waris WNA tersebut. Maka dari itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kewenangan dan hak untuk mewaris bagi WNA menurut KUHPerdara dan UU Perkawinan, serta bagaimana implikasi hak mewaris WNA dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) selama adanya pembatasan masuknya WNA di masa pandemi Covid-19.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam pendapat hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan metode pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta wawancara narasumber. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, menurut KUHPerdara ahli waris WNA memiliki kewenangan atas hak keperdataannya untuk menerima warisan dari orangtuanya yang berasal dari perkawinan campuran yang melakukan pemisahan harta yang dituang dalam perjanjian perkawinan. Walaupun demikian, ahli waris WNA dibatasi untuk mempunyai hak milik sebagaimana diatur UUPA. Sedangkan UU perkawinan sendiri belum mengatur perihal harta kekayaan yang beralih karna kematian yakni pewarisan, sehingga dalam penegakan hukum masih berdasarkan KUHPerdara dan hukum lainnya yang berlaku; *kedua*, teruntuk sekarang pengurusan peralihan hak atas tanah masih memerlukan kehadiran fisik dalam hal penandatanganan dan pembacaan akta, sehingga ahli waris WNA terpaksa harus mengurus langsung ke Indonesia walaupun di tengah pandemi. Peraturan kementerian mengenai pembatasan warga negara asing masuk ke Indonesia telah dicabut, sehingga warga negara asing apapun itu urusannya termasuk pengurusan peralihan hak atas waris diperbolehkan masuk Indonesia dengan tetap mengindahi protokol kesehatan yang berlaku. Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yakni: *pertama*, diperlukan adanya pencerdasan hukum yang masif mengenai pemisahan harta perkawinan yang dituang dalam perjanjian kawin kepada pelaku perkawinan campuran; *kedua*, diperlukan adanya pendobrakan hukum yang mengakomodir secara khusus mengenai pelayanan jasa hukum secara elektronik oleh Notaris agar proses prealihan hak atas tanah dapat dilaksanakan secara efektif.

Kata Kunci: Hak dan Kedudukan Ahli Waris WNA, Peralihan Hak Atas Tanah WNA dan Pandemi COVID-19.

ABSTRACT

The issue of foreign heirs who come from mixed marriages often raises questions about their rights and authority to receive an inheritance from their Indonesian parents that came from mixed marriages. Moreover, during the Covid-19 pandemic, there were restrictions on the entry of foreigners in order to reduce the spread of the virus in Indonesia, while the foreigner heirs may not be domiciled in Indonesia. Meanwhile, processing the transition of land rights due to inheritance, physical presence was required. Subsequently, if the foreign heirs exceed the one year period stipulated by the Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA), the inheritance will belong to the state. This possibility will injure the foreign heirs. Therefore, the formulation of the research problem is how the authority and right to inherit for foreigners according to the Civil Code and the Marriage Law, and how the implications of the inheritance rights of foreigners are related to the provisions of Article 21 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA).) as long as there are restrictions on the entry of foreigners during the Covid-19 pandemic. This legal opinion writing aims to find out and analyze how the rights and authority of foreign heirs to receive an inheritance according to the KUHP (Civil Code) and the Marriage Law (UUP) and to know the process of the transition of land rights that must be settled by the foreign heirs during the Covid-19 pandemic.

The approach method used in this legal research is a normative juridical approach or legal research literature with secondary data collection methods in the form of statutory regulations and interviewing sources. Based on the results of the study, it can be concluded that: first, according to the Civil Code (KUHP), foreign heirs have the authority over their civil rights to receive an inheritance from their parents that came from mixed marriages that separate their assets on prenuptial agreement. However, foreigners are still limited by having property rights as mentioned in UUPA. Meanwhile, the marriage law itself does not regulate assets that are transferred due to death, namely inheritance, so the law enforcement is still based on Civil Law (KUHP) and other applicable laws; second, for now, the process of the transition of land rights still requires a physical presence in terms of signing and reading the deed, so that foreign heirs are forced to settle the transfer of land rights directly to Indonesia even in the midst of the pandemic. The ministerial regulation regarding restrictions on foreign nationals entering Indonesia has been revoked, so that any foreign citizen, regardless of his business, including settling the transition of land rights due to inheritance, is allowed to enter Indonesia while still adhering to the applicable health protocols. Author's suggestions are: first, there is a need for massive legal intelligence regarding the separation of marital property as stated in the prenuptial agreement to mixed marriage parties; second, there is a need for a legal breakthrough that specifically accommodates legal services electronically by a Notary so that the transition of land rights will be effective.

Keywords: Rights and Authority of Foreign Heirs, Transition of Foreign Land Rights, and COVID-19 Pandemic.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Analisis Data	13
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Sejarah Perkawinan	17
3. Syarat Sah Perkawinan	18
4. Akibat Hukum Perkawinan	21
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Campuran Menurut KUHPerduta dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	27
1. Pengertian Perkawinan Campuran	27
2. Tata Cara Perkawinan Campuran	29

3.	Akibat Perkawinan Campuran.....	33
4.	Pengertian Tentang Kewarganegaraan	44
5.	Perjanjian Kawin	46
C.	Tinjauan Umum Tentang Pewarisan.....	52
1.	Pengertian Pewarisan	52
2.	Syarat Pewarisan	55
3.	Golongan Ahli Waris	57
4.	Pewarisan Berupa Benda Tidak Bergerak	62
D.	Tinjauan Umum tentang Pandemi Covid-19	67
1.	Pengertian Pandemi Covid-19	67
2.	Kebijakan di Masa Pandemi Covid-19	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		71
A.	Hak dan Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Ahi Waris Yang Memperoleh Pewarisan Berupa Properti Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	71
1.	Ahli Waris Warga Negara Asing (WNA) Lahir dari Perkawinan Campuran	71
2.	Harta Kekayaan Sebagai Salah Satu Akibat Hukum yang Timbul dari Perkawinan Campuran	76
3.	Penerapan Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UUPA Yang Berkaitan Dengan Kepemilikan Aset Berupa Tanah Bagi Pewaris WNA	81
B.	Implikasi Hak Mewaris WNA yang Tunduk Kepada KUHPerdara dan UU Perkawinan Dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 21 Ayat 3 UUPA Selama Adanya Pembatasan Masuknya WNA di Masa Pandemi Covid-19	85
1.	Kebijakan Keimigrasian yang Diterbitkan Pemerintah Untuk Menekan Pertumbuhan Angka Covid-19 di Indonesia	85
2.	Alur Administrasi Pengurusan Peralihan Tanah Pewarisan WNA Selama Masa Pandemi.....	104
BAB IV PENUTUP		124
A.	Simpulan.....	124
B.	Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA		128